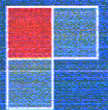


RENCANA STRATEGIS KINERJA (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINJAI

Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Kel. Balangnipa
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
Telp/Fax (0482) 2410050 Kode Pos 92612
dinsossinjai_secret@yahoo.com;
dinsossinjaisecret@gmail.com



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sinjai yang bertugas secara teknis operasional dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dituangkan dalam suatu Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama lima tahun berturut-turut dan berorientasi pada hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Program dan kegiatan tersebut merupakan perencanaan yang akan dilaksanakan, baik secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sinjai maupun oleh masyarakat dengan pendampingan oleh Dinas Sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai inti dari tugas pokok Dinas Sosial harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk itu maka dipandang penting adanya suatu perencanaan yang dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Strategis sebagai titik awal dalam memahami dan menetapkan tindakan yang perlu diambil dalam memecahkan dan menuntaskan permasalahan di bidang kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis Dinas Sosial adalah dokumen perencanaan untuk lima tahun (2018-2023) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai dan Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial. Rencana Strategis ini bersifat indikatif, dengan substansi/muatan Renstra ini terdiri dari; visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, dilakukan melalui pendekatan teknokratis dan pendekatan partisipatif. Pendekatan teknokratis berupa review secara menyeluruh kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial selama lima tahun sebelumnya. Sedangkan pendekatan partisipatif berupa pelibatan berbagai pihak dalam memberikan informasi dan aspirasi menyangkut berbagai kondisi masyarakat yang membutuhkan penanganan di bidang kesejahteraan sosial sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan Rencana strategis ini.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan melalui tahapan; persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Dinas Sosial ini memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan, yaitu bahwa penyusunan Renstra ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, RPJMD Kabupaten Sinjai, dan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana tata Ruang Kabupaten Sinjai, dan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sinjai.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mengacu pada: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis ini akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial Kabupaten Sinjai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), dengan Tugas pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah menyediakan dokumen perencanaan pada Dinas Sosial untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup; gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini, yaitu:

1. Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sosial untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan mendukung visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas sosial dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial periode 2018-2023.

Bab II, berisi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang didalamnya menguraikan tentang: Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Dinas Sosial, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan mengenai Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Bab III, berisi Permasalahan dan Isu-Isu strategis, yang didalamnya menguraikan tentang: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih; Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan; Telaahan RTRW dan KLHS; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV, berisi Tujuan dan Sasaran. Dalam kaitan dengan Tujuan, dalam bab ini diuraikan mengenai tujuan yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Dinas Sosial, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang bterukur dann dapat dicapai dalam periode tahun 2018-2023. Sedangkan menyangkut mengenai Sasaran, yaitu diuraikan tentang hasil

yang diharapkan dari setiap tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dalam jangka waktu tahun 2018-2013.

Bab V, Berisi Strategi dan Arah Kebijakan. Dalam kaitan dengan strategi, dalam Bab ini dikemukakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan menyangkut tentang Kebijakan, diuraikan mengenai arah/tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai Renstra Dinas Sosial.

Bab VI, berisi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Dalam kaitan dengan program, dikemukakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan menyangkut tentang kegiatan, dikemukakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

VII. berisi Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. Merupakan Bab Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Sinjai adalah melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial yang menjadi tanggung jawab kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi Dinas Sosial adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut di atas, maka sasaran utama yang menjadi tugas pokok Dinas Sosial adalah penanganan 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
4. Lanjut Usia Terlantar
5. Anak dengan Kedisabilitas
6. Penyandang Disabilitas
7. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
8. Anak yang berhadapan dengan hukum
9. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
10. Anak Jalanan
11. Korban Tindak Kekerasan
12. Tuna Susila
13. Pengemis
14. Gelandangan
15. Pemulung
16. Kelompok Minoritas
17. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
18. Korban Penyalahgunaan NAPZA
19. Fakir Miskin

20. Komunitas Adat Terpencil
21. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
22. Korban Bencana Alam
23. Korban Bencana Sosial
24. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
25. Orang dengan HIV/AIDS
26. Korban Trafficking

2.2. Sumberdaya Organisasi

Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya memanfaatkan sumberdaya manusia dan aset/modal, sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai pegawai pada Dinas Sosial adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari 17 orang Aparatur Sipil Negara, tenaga pendamping dari Kementerian Sosial sebanyak 2 Orang, tenaga sukarela sebanyak 30 orang. Dari sejumlah sumberdaya manusia tersebut jika dilihat menurut jabatan, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Pejabat eselon II : 1 orang

Pejabat eselon III : 3 orang

Pejabat eselon IV : 7 orang

Non eselon : 6 orang

Tenaga Pendamping : 2 orang

Tenaga sukarela : 30 orang

Khusus untuk tenaga pendamping yang merupakan tenaga kontrak oleh Kementerian Sosial yang ditugaskan di Sinjai terdiri dari tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 29 orang, tenaga pendamping anak 2 orang, dan tenaga pendamping disabilitas sebanyak 1 orang.

Untuk tenaga sukarela yang jumlahnya sebanyak 149. Orang, terdiri dari; Taruna Siaga Bencana 29 Orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 10 orang, tenaga/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di desa/Kelurahan sebanyak 80 orang, dan tenaga administrasi sebanyak 30 Orang.

b. Aset/Modal

Aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial sampai dengan Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Bidang/Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	2	3	4
01	TANAH		
	- Tanah Bangunan	1	
	- Tanah Bangunan Loka Bina Karya (LBK)	1	

02	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat-alat Angkutan		
	- Minibus (Mitsubishi Maven)	1	
	- Pick up Hilux	1	
	- Sepeda Motor	14	
	- Perahu Karet	2	
	b. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari Kayu	6	
	- Rak Arsip	3	
	- Kursi Kerja	57	
	- Kursi Lipat	10	
	- Meja biro	8	
	- Mesin Ketik Manual	3	
	- Kipas Angin	3	
	- wireless	1	
	- Kamera Digital	1	
	- PC Unit	8	
	- Laptop	6	
	- Meja Kerja Pejabat Es II	1	
	- Meja Kerja Pejabat Es III	4	
	- Kursi Kerja Pejabat Es II	1	
	- Kursi Kerja Pejabat Es III	4	
	- Printer	13	
	- UPS	1	
	- AC	8	
	- Brangkas	1	
03	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Bangunan Gedung		
	- Bangunan Gedung Kantor	1	
	- Bangunan Gedung LBK	1	
	- Bangunan Asrama	1	

2.3. Kinerja Pelayanan

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sinjai

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan				0	0	0	0	0										
2	Rasio kesenjangan kemiskinan																		
3	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari																		
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80%																	
5	Persentase PMKS yang tertangani	80%																	
6	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%																	
7	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%																	
8	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	80%			10	10	10	13	13	10	10	10	13	13	100	100	100	100	100
9	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
10	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%																	
11	Persentase korban bencana yang diayakui dengan	80%																	

Tabel T-C.2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sinjai

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	232.282.500	430.228.000	461.593.500	1.013.943.416	824.585.000	231.652.500	430.228.000	461.593.500	960.210.400	757.245.900	99,73	100	100	94,14	91,83	592.526.483,20	568.186.060
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya	55.365.000	72.135.000	18.250.000	39.020.000	1.302.290.000	55.365.000	72.135.000	18.250.000	39.019.900	390.097.500	100	100	100	99,99	29,95	297.412.000	114.973.480
Persentase Panti Sosial Skala Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	19.770.000	0	43.164.000	18.362.400	0	19.580.000	0	43.164.000	18.222.400	0	99,04	0	100	100	0	16.259.280	16.193.280
Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	72.600.000	353.430.000	206.615.000	371.980.000	446.450.000	46.595.000	280.607.400	206.443.000	368.510.000	419.129.000	64,18	79,40	99,92	99,07	93,88	290.215.000	164.256.880

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Sosial RI, Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Sinjai, dan hasil analisis terhadap KLHS, terdapat kondisi yang dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Sinjai untuk lima tahun mendatang.

Adapun tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya jumlah sasaran penerima manfaat dalam program yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi selatan dalam kaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), di mana kewenangan verifikasi dan validasi dalam rangka akurasi data sasaran penerima manfaat diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Sosial. Kondisi tersebut membutuhkan jumlah sumberdaya manusia yang harus sebanding dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan. Di samping itu kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki belum mempunyai kemampuan yang cukup memadai dalam menjalankan tugas-tugas yang harus ditangani secara profesional dengan fasilitas sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Tantangan lain yang dihadapi adalah cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak sebanding dengan Struktur Organisasi dengan Kategori C, yang berimplikasi terhadap penggabungan Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, serta hanya terdiri dari 2 (dua) Bidang Urusan, sehingga tugas pokok dan fungsi pada kedua bidang tersebut harus mencakup keseluruhan urusan di bidang penanganan kesejahteraan sosial yang terdiri dari pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Seiring dengan tantangan yang dihadapi, Dinas Sosial juga memiliki peluang dalam pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial, antara lain: adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan berupa pengalokasian program kegiatan yang diikuti dengan penempatan tenaga-tenaga pendampingan. Demikian pula adanya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparat Dinas sosial yang dilaksanakan baik oleh Kementerian sosial maupun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu penyelenggaraan pelatihan-pelatihan oleh Lembaga Pelatihan Kesejahteraan Sosial oleh Kementerian Sosial tetap memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengirimkan peserta dari PMKS untuk dilatih dengan berbagai jenis pelatihan keterampilan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Cakupan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, adalah menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui upaya; rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial terhadap 26 (dua puluh enam) jenis kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun yang termasuk dalam kategori PMKS adalah:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
4. Lanjut Usia Terlantar
5. Anak dengan Kedisabilitas
6. Penyandang Disabilitas
7. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
8. Anak yang berhadapan dengan hukum
9. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
10. Anak Jalanan
11. Korban Tindak Kekerasan
12. Tuna Susila
13. Pengemis
14. Gelandangan
15. Pemulung
16. Kelompok Minoritas
17. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
18. Korban Penyalahgunaan NAPZA
19. Fakir Miskin
20. Komunitas Adat Terpencil
21. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
22. Korban Bencana Alam
23. Korban Bencana Sosial
24. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
25. Orang dengan HIV/AIDS
26. Korban Trafficking

Permasalahan pokok dalam kaitan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah masih rendahnya tingkat penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di dalamnya termasuk masyarakat miskin dan rentan miskin, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Permasalahan pokok tersebut merupakan dampak dari belum maksimalnya penjangkauan informasi dan cakupan pelayanan PMKS di setiap desa/kelurahan. Belum maksimalnya penjangkauan

informasi dan cakupan pelayanan PMKS tersebut disebabkan antara lain karena belum adanya sistem pelayanan yang terintegrasi dan terkoneksi dari tingkat kabupaten sampai ke setiap desa/kelurahan dengan dukungan partisipasi masyarakat. Selain itu juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan secara profesional.

Selain itu, masalah masih lemahnya sistem penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial, juga masih menjadi faktor yang mempengaruhi permasalahan pokok tersebut di atas. Lemahnya sistem tersebut sebagai akibat dari penguasaan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan manajemen penanganan pasca bencana yang masih rendah. Selain itu juga disebabkan karena belum adanya dukungan sumberdaya manusia yang professional, dan belum adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Rendahnya akurasi data PMKS sebagai sasaran penanganan berbagai kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial juga menjadi penyebab terjadinya masalah pokok tersebut di atas. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pendataan, juga belum terbangunnya sistem informasi yang terkoneksi dari desa/kelurahan secara cepat, serta dukungan sumberdaya manusia yang tidak memadai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing

Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, professional, transparan dan partisipatif.
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pendapatan daerah secara tepat.
4. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.
6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka dengan mencermati

Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, nampak bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial juga sangat terkait dengan Visi, Misi, dan Program kerja tersebut. Keterkaitan tersebut terdapat pada kalimat Visi yang menyangkut Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dimana dalam kaitan ini tugas pokok dan fungsi dinas sosial adalah bagaimana para PMKS dapat hidup layak sebagai cerminan dari kualitas hidup yang baik.

Adapun keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas sosial dengan Misi tersebut di atas adalah terhadap Misi ke 2 yaitu Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan dengan Misi tersebut sangat erat oleh karena dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial perlu melibatkan masyarakat untuk berperan serta. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, di mana pada pasal 51 ayat (1) dinyatakan "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial". Hal tersebut menjadi bagian dari tugas Dinas Sosial untuk membangun kolaborasi dan mendorong masyarakat untuk berperan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun keterkaitan dengan program adalah terhadap program bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan kegiatan memfasilitasi program bagi penyandang disabilitas. Program tersebut memang menjadi bagian dari program dan kegiatan pokok dari Dinas Sosial yang dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang dananya bersumber dari pemerintah pusat maupun dari dana pemerintah Kabupaten Sinjai.

Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, baik yang merupakan faktor penghambat maupun berupa faktor pendorong. Adapun faktor penghambat yang masih dialami adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan penanganan PMKS dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal tersebut diakibatkan oleh belum terbangunnya keterpaduan dari aparat Dinas sosial dengan aparat pemerintah desa/kelurahan dalam upaya mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berperan dalam berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Seiring dengan adanya faktor penghambat tersebut, terdapat pula faktor yang dapat menjadi pendorong yang dapat dioptimalkan dalam pencapaian visi, misi, dan program yang mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas sosial, yaitu adanya potensi pelibatan masyarakat untuk ikut berperan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, di mana pada Pasal 53 dinyatakan bahwa "Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. Pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

3.3 Telaahan Renstra

Kegiatan pelayanan pada Dinas Sosial dalam kaitannya dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial, Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Renstra Pemerintah Kabupaten Sinjai, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, baik berupa faktor penghambat maupun berupa faktor pendorong.

Sebagai faktor penghambat adalah belum adanya data terpadu PMKS yang valid khususnya kategori PMKS yang berkebutuhan khusus, terbatasnya sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun dari segi kualitas, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung berbagai kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Adapun yang diharapkan sebagai faktor pendorong adalah adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengalokasikan berbagai jenis program kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Sinjai, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga diikuti dengan penempatan tenaga pendamping, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan bantuan modal terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selain itu, juga adanya pengalokasian logistik bagi korban bencana baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Sulawesi selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial, baik yang merupakan faktor penghambat maupun berupa faktor pendorong.

Adapun faktor yang merupakan faktor penghambat adalah belum dipahaminya secara mendalam mengenai RTRW dan KLHS oleh seluruh aparat Dinas Sosial. Selain itu, juga dalam RTRW dinyatakan bahwa Sistem jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) di Kabupaten Sinjai hanya pada Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Sinjai Selatan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi percepatan penjangkauan informasi dan pelayanan PMKS di Kecamatan lainnya yang tidak terlayani dengan jaringan komunikasi oleh STO.

Sedangkan faktor yang merupakan faktor pendorong adalah bahwa di dalam RTRW telah ditetapkan kawasan rawan bencana alam banjir dan tanah longsor sehingga memudahkan antisipasi atau

kesiapsiagaan penanganan bencana khususnya penyiapan dan penyaluran bantuan logistik. Demikian pula penetapan kawasan budidaya pertanian dan industri dalam RTRW akan memberikan arah dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin terutama dalam hal mensinkronisasikan antara minat/potensi yang dimilikinya dengan dukungan potensi sumberdaya alam di setiap wilayah. Demikian pula di dalam KLHS terdapat kajian pemanfaatan sumberdaya alam/lingkungan hidup dengan mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat sehingga memberikan dorongan bagi peningkatan berbagai kegiatan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari beberapa telaahan sebagaimana diuraikan di atas, baik berupa faktor penghambat maupun faktor pendorong, ditelaah lebih lanjut untuk diidentifikasi menjadi beberapa isu strategis dan selanjutnya isu-isu strategis tersebut dibedakan antara dimensi internal dan dimensi eksternal.

Adapun isu-isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara internal, dapat dikemukakan bahwa keberadaan Dinas Sosial dengan kategori Perangkat Daerah Tipe C melahirkan keterbatasan sumberdaya organisasi dalam menjangkau dan menangani berbagai permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat khususnya bagi PMKS. Salah satu isu strategis yang erat kaitannya dengan penajaman sasaran penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah masalah validitas data PMKS yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi secara baik akibat keterbatasan sumberdaya organisasi.

Demikian pula kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki belum mampu mendorong dan memotivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperanserta dalam penanganan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya PMKS, termasuk di dalamnya masyarakat miskin dan rentan miskin. Dari segi sarana dan prasarana juga menjadi permasalahan yang mengakibatkan rendahnya capaian penanganan permasalahan sosial terutama dari segi sarana mobilitas dan fasilitas tempat pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Secara eksternal, Kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan penguatan terhadap upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sinjai. Kebijakan tersebut berupa pengalokasian program kegiatan setiap tahunnya berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan bantuan permodalan terhadap Kelompok Usaha BERSAMA (KUBE).

Isu eksternal lainnya yang cukup berpengaruh terhadap percepatan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah peranserta masyarakat yang masih rendah sehingga dibutuhkan sosialisasi dan upaya untuk mendorong masyarakat agar terlibat secara langsung dalam menyukseskan penyelenggaraan Kesejahteraan bagi PMKS yang merupakan bagian dari masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan, dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah “Meningkatkan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”. Sedangkan sasaran jangka menengah yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
- b. Meningkatnya kualitas layanan non Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Meningkatkan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
1		Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatnya kualitas layanan non standar pelayanan minimal bidang sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keluarga miskin yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditempuh melalui suatu strategi, yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas sosial, dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan:

- a. Meningkatkan sistem penjangkauan pelayanan dan informasi ke seluruh desa/kelurahan.
- b. Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan lanjut dalam kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Melakukan percepatan pelayanan bantuan logistik dalam rangka perlindungan sosial bagi korban bencana.
- e. Meningkatkan ketepatan dan keakuratan data sasaran pemberian jaminan sosial.
- f. Memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
Misi 2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan sistem penjangkauan pelayanan dan informasi ke seluruh desa/kelurahan
		Pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Melaksanakan pendampingan dan pembinaan lanjut dalam kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan ketepatan dan keakuratan data sasaran pemberian jaminan sosial
			Melakukan percepatan pelayanan bantuan logistik dalam rangka perlindungan sosial bagi korban bencana

Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas layanan non standar pelayanan minimal bidang sosial	Pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Melaksanakan pendampingan dan pembinaan lanjut dalam kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

Table 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Kategori	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023			Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana SKPD	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	
			0.00	00 01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	1,372,286,348.00	100 %	1,081,918,848.00	100 %	1,193,081,610.00	100 %	1,288,581,610.00	100 %	1,258,831,610.00	100 %	8,194,460,028.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	66,000,000.00	12 Bulan	66,000,000.00	12 Bulan	66,000,000.00	12 Bulan	66,000,000.00	12 Bulan	66,000,000.00	12 Bulan	330,000,000.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terbayarkan	21 Unit	8,400,000.00	26 Unit	36,000,000.00	56 Unit	10,000,000.00	57 Unit	10,000,000.00	62 Unit	10,000,000.00	87 Unit	74,400,000.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,760,000.00	12 Bulan	15,760,000.00	12 Bulan	15,760,000.00	12 Bulan	15,750,000.00	12 Bulan	15,760,000.00	12 Bulan	72,800,000.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	4,675,000.00	12 Bulan	4,675,000.00	12 Bulan	4,675,000.00	12 Bulan	4,675,000.00	12 Bulan	4,675,000.00	60 Bulan	23,375,000.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perlengkapan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	3,600,000.00	12 Bulan	3,600,000.00	12 Bulan	3,600,000.00	12 Bulan	3,600,000.00	12 Bulan	3,600,000.00	60 Bulan	18,000,000.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	266,130,340.00	12 Bulan	218,405,340.00	12 Bulan	218,405,340.00	12 Bulan	218,405,340.00	12 Bulan	218,405,340.00	60 Bulan	1,139,751,700.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 Dokumen	119,721,270.00	12 Dokumen	119,721,270.00	12 Dokumen	119,721,270.00	12 Dokumen	118,721,270.00	12 Dokumen	119,721,270.00	60 Dokumen	598,606,350.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	278,424,238.00	100 %	278,337,238.00	100 %	300,000,000.00	100 %	350,000,000.00	100 %	350,000,000.00	100 %	1,556,761,476.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	5 Unit	252,125,500.00	30 Unit	80,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	5 Unit	110,000,000.00	5 Unit	110,000,000.00	87 Unit	652,125,500.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	38,200,000.00	10 Unit	5,000,000.00	10 Unit	35,000,000.00	10 Unit	40,000,000.00	10 Unit	40,000,000.00	50 Unit	158,200,000.00	Dinas Sosial
			0.00	00 01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	44,500,000.00	10 Unit	5,000,000.00	10 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,500,000.00	5 Unit	50,500,000.00	40 Unit	200,500,000.00	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(20)		
			0.00 00 01 049	Pengadaan Mebelur	Jumlah mebelur yang tersedia		12 Unit	15,450,000.00	20 Unit	31,500,000.00	20 Unit	25,000,000.00	20 Unit	25,000,000.00	20 Unit	25,000,000.00	50 Unit	121,950,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 051	Pengadaan Instalasi Listrik				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 053	Penambahan Daya Instalasi Listrik	Jumlah instalasi listrik yang ditambah kapasitas daya		0 Instalasi	0.00	1 Instalasi	0.00	0 Instalasi	0.00	1 Instalasi	30,000,000.00	0 Instalasi	0.00	2 Instalasi	30,000,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara		2 Unit	80,000,000.00	2 Unit	33,000,000.00	2 Unit	33,000,000.00	2 Unit	33,000,000.00	2 Unit	33,000,000.00	2 Unit	212,000,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 061	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		21 Unit	109,800,000.00	28 Unit	111,420,000.00	58 Unit	111,420,000.00	57 Unit	111,420,000.00	62 Unit	111,420,000.00	67 Unit	555,480,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		10 Unit	13,000,000.00	10 Unit	11,000,000.00	10 Unit	11,000,000.00	10 Unit	11,000,000.00	10 Unit	11,000,000.00	50 Unit	57,000,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		28 Unit	12,500,000.00	26 Unit	12,500,000.00	28 Unit	12,500,000.00	28 Unit	12,500,000.00	28 Unit	12,500,000.00	28 Unit	62,500,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 066	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	Jumlah mebelur yang dipelihara		0 Unit	0.00	5 Unit	0.00	5 Unit	5,000,000.00	5 Unit	5,000,000.00	5 Unit	5,000,000.00	20 Unit	15,000,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 078	Pengadaan Pakalan Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan		0 Pasang	0.00	20 Pasang	0.00	20 Pasang	10,000,000.00	20 Pasang	10,000,000.00	20 Pasang	10,000,000.00	80 Pasang	30,000,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 081	Pengadaan Pakalan khusus sehari-hari tertentu			0	0.00	0	0.00	0	12,000,000.00	0	12,000,000.00	0	12,000,000.00	0	36,000,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 01 096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		6 Orang	50,000,000.00	6 Orang	50,000,000.00	6 Orang	50,000,000.00	6 Orang	50,000,000.00	6 Orang	50,000,000.00	30 Orang	250,000,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 02	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100 %	99,630,323.00	100 %	92,330,323.00	100 %	112,330,323.00	100 %	112,330,323.00	100 %	112,330,323.00	100 %	520,151,515.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 02 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah yang disusun setiap bulan		12 Bulan	45,314,746.00	12 Bulan	46,064,746.00	12 Bulan	46,064,746.00	12 Bulan	46,064,746.00	12 Bulan	46,064,746.00	60 Bulan	229,573,730.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 02 002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun		0 Dok	0.00	2 Dok	0.00	2 Dok	20,000,000.00	2 Dok	20,000,000.00	2 Dok	20,000,000.00	8 Dok	60,000,000.00	Dinas Sosial	
			0.00 00 02 009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA dan DPPA yang disusun dan ditetapkan		6 Dokumen	45,515,577.00	6 Dokumen	46,265,577.00	6 Dokumen	48,265,577.00	6 Dokumen	48,265,577.00	6 Dokumen	48,265,577.00	30 Dokumen	230,577,885.00	Dinas Sosial	

Urutan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab															
							2019					2020						2021					2022					2023				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)	(20)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)													
				REHABILITASI SOSIAL																												
	1.01		06 15	PENYANDANG DISABILITAS, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA DAN TUNA SOSIAL DI LUAR PANTI	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)	100%	100 %	739,188,646.00	100 %	685,388,646.00	100 %	1,016,388,646.00	100 %	1,360,388,646.00	100 %	1,360,388,646.00	130 %	5,160,743,230.00	Dinas Sosial													
	1.01		06 15 001	Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jumlah laporan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum	12 Laporan	12 Laporan	66,155,757.00	12 Laporan	61,155,757.00	12 Laporan	61,155,757.00	12 Laporan	61,155,757.00	12 Laporan	61,155,757.00	60 Laporan	310,778,785.00	Dinas Sosial													
	1.01		06 15 002	Layanan Detas dan Pengaduan masalah sosial/penyandang Disabilitas Terlar, Lanjut Usia Terlar, Anak Terlar, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlar	Jumlah laporan layanan data dan pengaduan masalah sosial yang tersedia	80 Laporan	80 Laporan	311,902,616.00	80 Laporan	278,102,618.00	80 Laporan	278,102,618.00	80 Laporan	278,102,618.00	80 Laporan	278,102,618.00	400 Laporan	1,424,313,090.00	Dinas Sosial													
				Penjaglaun dan Evakuasi Kedaruratan Penyandang Disabilitas Terlar, Lanjut Usia Terlar, Anak Terlar, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlar	Jumlah laporan penjaglaun dan evakuasi kedaruratan sosial	12 Laporan	12 Laporan	153,050,363.00	12 Laporan	153,050,363.00	12 Laporan	153,050,363.00	12 Laporan	153,050,363.00	12 Laporan	153,050,363.00	60 Laporan	785,251,815.00	Dinas Sosial													
	1.01		06 15 004	Bantuan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlar, Lanjut Usia Terlar, Anak Terlar, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlar	Jumlah paket bantuan kedaruratan sosial penanganan orang terlar yang tersedia	100 Paket	50 Paket	50,000,000.00	50 Paket	50,000,000.00	50 Paket	50,000,000.00	50 Paket	50,000,000.00	50 Paket	50,000,000.00	300 Paket	250,000,000.00	Dinas Sosial													
	1.01		06 15 005	Bimbingan sosial Usaha Ekonomis Produktif Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bimbingan sosial	35Orang	0Orang	53,079,908.00	0Orang	0.00	0Orang	0.00	0Orang	0.00	0Orang	0.00	35Orang	53,079,908.00	Dinas Sosial													
	1.01		06 15 006	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Penyandang Disabilitas	Jumlah paket bantuan usaha ekonomis produktif penyandang disabilitas	35Paket	0Paket	105,000,000.00	0Paket	0.00	0Paket	0.00	0Paket	0.00	0Paket	0.00	35Paket	105,000,000.00	Dinas Sosial													
	1.01		06 15 007	Biaya Operasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	0KK	25 KK	0.00	25 KK	0.00	25 KK	125,000,000.00	25 KK	125,000,000.00	25 KK	125,000,000.00	100 KK	375,000,000.00	Dinas Sosial													
	1.01		06 15 008	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	0KK	0KK	0.00	0KK	0.00	25 KK	0.00	25 KK	375,000,000.00	25 KK	375,000,000.00	100 KK	750,000,000.00	Dinas Sosial													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Prinsip yang Jaring	
							2019		2020		2021		2022		2023			Kendali Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(20)
			1.01 06 15 009	Bimbingan Sosial Usaha/Ekonomis Produktif Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah sasaran rehabilitasi sosial yang mendapatkan bimbingan sosial		0Orang	0.00	80Orang	53,079,908.00	80Orang	53,079,908.00	80Orang	53,079,908.00	80Orang	53,079,908.00	320 Orang	Dinas Sosial
			1.01 06 15 010	Bantuan Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah paket bantuan program rehabilitasi sosial		0Paket	0.00	80Paket	90,000,000.00	80Paket	90,000,000.00	80Paket	90,000,000.00	80Paket	90,000,000.00	320 Paket	Dinas Sosial
			1.01 06 15 011	Sosialisasi tentang Kegiatan Rehabilitasi Sosial	Jumlah aparat dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang penanganan rehabilitasi sosial		0Orang	0.00	100 Orang	0.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	400 Orang	Dinas Sosial
			1.01 06 15 012	Monitoring dan Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program rehabilitasi sosial		0 Laporan	0.00	4 Laporan	0.00	4 Laporan	0.00	4 Laporan	50,000,000.00	4 Laporan	50,000,000.00	20 Laporan	Dinas Sosial
			1.01 06 15 013	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas	Dokumen rancangan peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas		0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	80,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	Dinas Sosial
			1.01 06 15 014	Pengadaan Peralatan Bantu bagi Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh peralatan bantu		0Orang	0.00	0Orang	0.00	10Orang	50,000,000.00	10Orang	50,000,000.00	10Orang	50,000,000.00	30Orang	Dinas Sosial
			1.01 06 16	PERLUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASCA-BENCANA	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPN Bidang Sosial)	100%	100 %	236,879,210.00	100 %	336,352,460.00	100 %	661,352,460.00	100 %	641,352,460.00	100 %	661,352,460.00	160 %	Dinas Sosial
			1.01 06 16 001	Penanganan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Jumlah laporan penanganan pasca bencana alam dan sosial		12 Laporan	136,879,210.00	12 Laporan	131,879,210.00	12 Laporan	131,879,210.00	12 Laporan	131,879,210.00	12 Laporan	131,879,210.00	80 Laporan	Dinas Sosial
			1.01 06 16 002	Bantuan Penanganan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Jumlah paket bantuan penanganan pasca bencana alam dan sosial		1Paket	100,000,000.00	1Paket	100,000,000.00	1Paket	200,000,000.00	1Paket	200,000,000.00	1Paket	200,000,000.00	5Paket	Dinas Sosial
			1.01 06 16 003	Bimbingan Teknis Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pelatihan TAGANA	Jumlah TAGANA yang dilatih dan KSB yang terbentuk		0Orang	0.00	0Orang	0.00	0Orang	0.00	160 Orang	80,000,000.00	0Orang	0.00	400 Orang	Dinas Sosial

			1.01	06	16	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan dan makam pahlawan yang terpelihara	0Tempat	0.00	3Tempat	36,800,000.00	3Tempat	36,800,000.00	3Tempat	36,800,000.00	3Tempat	147,200,000.00	Dinas Sosial
			1.01	06	16	005	Pelaksanaan Harp Hari Besar Nasional	Jumlah laporan pelaksanaan harp hari besar nasional	0 Laporan	0.00	2 Laporan	67,673,240.00	2 Laporan	67,673,240.00	2 Laporan	67,673,240.00	8 Laporan	270,692,860.00	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PQ Penanggung Jawab																		
							2019						2020							2021						2022						2023					
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		(20)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																		
			1.01	06	16	006	Bulan Bakti Kesetiaan Sosial (BEKSN)	Jumlah laporan pelaksanaan bulan bakti kesetiaan sosial nasional	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	4 Laporan	Dinas Sosial																	
			1.01	06	16	007	Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) berbasis Keluarga Miskin	Jumlah laporan pemutakhiran basis data terpadu yang terverifikasi dan valid	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	36 Laporan	Dinas Sosial																	
							Sosialisasi tentang Kegiatan Perlindungan Sosial, Jaringan Sosial dan BDT	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perlindungan sosial, jaminan sosial dan BDT	0Orang	0.00	0Orang	0.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	400 Orang	Dinas Sosial																	
			1.01	06	16	008	BANTUAN SOSIAL BERBASIS KELUARGA MISKIN	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	8.724 KK; Orang	209.840.430.00	8.724 : 50 KK ; Orang	141.464.690.00	8.724 KK; Orang	416.464.690.00	8.724 KK; Orang	9600 : 200 KK ; Orang	416.464.690.00	9600 : 500 KK ; Orang	1.000.669.190.00	Dinas Sosial																	
			1.01	06	17	001	Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan dan makam pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan dan makam pahlawan yang dipelihara	3Tempat	36.800.000.00	0Tempat	0.00	0Tempat	0.00	0Tempat	0.00	0.00	3Tempat	36.800.000.00	Dinas Sosial																	
			1.01	06	17	002	Pelaksanaan HariP hari besar Nasional	Jumlah laporan pelaksanaan hariP hari besar nasional	2 Laporan	72.943.240.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0.00	2 Laporan	72.943.240.00	Dinas Sosial																	
			1.01	06	17	003	Pendampingan dan Monitoring Program Keluarga Harapan	Jumlah laporan pendampingan dan monitoring program keluarga harapan	4 Laporan	47.103.980.00	4 Laporan	84.461.480.00	4 Laporan	84.461.480.00	4 Laporan	84.461.480.00	4 Laporan	84.461.480.00	20 Laporan	Dinas Sosial																	
			1.01	06	17	004	Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunas (BPNT)	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program bantuan pangan non tunas	4 Laporan	52.993.210.00	4 Laporan	56.993.210.00	4 Laporan	56.993.210.00	4 Laporan	56.993.210.00	4 Laporan	56.993.210.00	20 Laporan	Dinas Sosial																	

			1.01	06	17	005	Bantuan Jaminan Sosial bagi PMKS Non Prod.ktif	Jumlah PMKS non produktif yang mendapatkan jaminan sosial	00Orang	0.00	00Orang	0.00	100 Orang	100,000,000.00	150 Orang	100,000,000.00	200 Orang	100,000,000.00	500 Orang	Dinas Sosial
			1.01	06	17	006	Pelayanan dan Pemeliharaan Data Pencatatan Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS	Waktu pelayanan dan pemeliharaan data penerima bantuan iuran JKN-KIS	00Bulan	0.00	00Bulan	0.00	12Bulan	100,000,000.00	12Bulan	100,000,000.00	12Bulan	100,000,000.00	48 Bulan	Dinas Sosial
			1.01	06	17	007	Sosialisasi tentang Kegiatan Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Miskin	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang bantuan sosial berbasis masyarakat	00Orang	0.00	00Orang	0.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	400 Orang	Dinas Sosial
			1.01	06	18		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat	300 Orang	585,299,666.00	500 Orang	649,495,056.00	300 Orang	1,335,869,666.00	300 Orang	1,335,869,666.00	600 Orang	1,335,869,666.00	2300 Orang	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PT Penanggung Jawab			
							2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)										(20)				
			1.01	06	18	001	Pemeliharaan Basis Data Terpadu (BDT) berbasis Aplikasi	Jumlah pemutakhiran basisdata terpadu yang terverifikasi dan valid	9 Dokumen	305,202,340.00	9 Dokumen	273,982,340.00	9 Dokumen	273,982,340.00	9 Dokumen	273,982,340.00	45 Dokumen	1,491,131,700.00	Dinas Sosial	
			1.01	06	18	002	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang dibendayakan	0Orang	83,902,050.00	0Orang	0.00	0Orang	0.00	0Orang	0.00	9Orang	83,902,050.00	Dinas Sosial	
			1.01	06	18	003	Bimbingan Kewirausahaan Usaha KUBE Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang mengikuti bimbingan kewirausahaan usaha KUBE	300 Orang	56,185,286.00	300 Orang	64,185,286.00	500 Orang	64,185,286.00	500 Orang	64,185,286.00	2300 Orang	312,926,330.00	Dinas Sosial	
			1.01	06	18	004	Pencapaian Aplikasi Pencatatan PMKSBDT berbasis android	Tersedianya aplikasi pencatatan PMKSBDT berbasis android	1Aplikasi	50,000,000.00	0Aplikasi	0.00	0Aplikasi	0.00	0Aplikasi	0.00	1Aplikasi	50,000,000.00	Dinas Sosial	
			1.01	06	18	005	Bantuan usaha KUBE bagi PMKS	Jumlah paket bantuan usaha KUBE bagi PMKS	0KUBE	0.00	0KUBE	0.00	50 KUBE	500,000,000.00	50 KUBE	500,000,000.00	200 KUBE	1,500,000,000.00	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Pembangunan Jangka Panjang				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2019	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	(19)	(20)
					Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat miskin		00Orang		0.00	00Orang	0.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	400 Orang	225,000,000.00		Dinas Sosial
					Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial		00Orang		0.00	90Orang	132,702,050.00	90Orang	132,702,050.30	90Orang	132,702,050.00	90Orang	132,702,050.00	0Orang	530,808,200.00		Dinas Sosial
					Bimbingan Manajemen Pengurus Karang Taruna		0		0.00	0	0.00	0	40,000,000.30	0	40,000,000.00	0	40,000,000.00	0	120,000,000.00		Dinas Sosial
					Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin		0		0.00	0	0.00	0	50,000,000.30	0	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0	150,000,000.00		Dinas Sosial
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatanganan Kemiskinan		0 Dokumen		0.00	1 Dokumen	80,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	80,000,000.00		Dinas Sosial
					Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)		0Unit		0.00	0Unit	0.00	5Unit	100,000,000.30	5Unit	100,000,000.00	5Unit	100,000,000.00	15Unit	300,000,000.00		Dinas Sosial
					Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota		0Unit		0.00	6Unit	98,626,000.00	5Unit	100,000,000.30	3Unit	100,000,000.00	3Unit	100,000,000.00	17Unit	388,626,000.00		Dinas Sosial
Grandtotal							3,234,314,613.00				2,986,940,613.00		4,634,477,376.00		5,154,377,376.00		5,044,977,376.00		21,065,697,381.00		

BAB VII

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RP-JMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RP-JMD		SKPD Penanggung Jawab	
				2019			2020			2021			2022						2023
				Target	(Rp)		Target	(Rp)		Target	(Rp)		Target	(Rp)		Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	SOSIAL	-	-		3.234.314.613		3.112.027.613		4.554.477.375		5.104.977.375		4.994.977.375		21.000.774.351				
	SOSIAL	-	-		1.771.197.942		1.937.691.442		3.249.065.442		3.704.065.442		3.624.065.442		14.286.085.710				
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Tuna Sosial di Luar Panti	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)	100%	100%	739.188.646	100%	735.388.646	100%	935.388.646	100%	1.310.388.646	100%	1.310.388.646	100%	5.030.743.230	Dinas Sosial			
	1 Pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum	Jumlah laporan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum	12 Dok	12 Lap	66.155.757	12 Lap	61.155.757	12 Lap	61.155.757	12 Lap	61.155.757	12 Lap	61.155.757	60 Lap	310.778.785	Dinas Sosial			
	2 Layanan Data dan Pengaduan masalah sosial penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar	Jumlah laporan layanan data dan pengaduan masalah sosial yang tersedia		80 Lap	311.902.618	80 Lap	278.102.618	80 Lap	278.102.618	80 Lap	278.102.618	80 Lap	278.102.618	400 Lap	1.424.313.090	Dinas Sosial			
	3 Penjangkauan dan Evakuasi Kedaruratan Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Jumlah laporan penjangkauan dan evakuasi kedaruratan sosial		12 Lap	153.050.363	12 Lap	153.050.363	12 Lap	153.050.363	12 Lap	153.050.363	12 Lap	153.050.363	60 Lap	765.251.815	Dinas Sosial			
	4 Bantuan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Jumlah paket bantuan kedaruratan sosial penanganan orang terlantar yang tersedia		100 Paket	50.000.000	50 Paket	50.000.000	50 Paket	50.000.000	50 Paket	50.000.000	50 Paket	50.000.000	300 Paket	250.000.000	Dinas Sosial			
	5 Bimbingan sosial Usaha Ekonomis Produktif Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bimbingan sosial	40 Orang	35 Orang	53.079.908									35 Orang	53.079.908	Dinas Sosial			

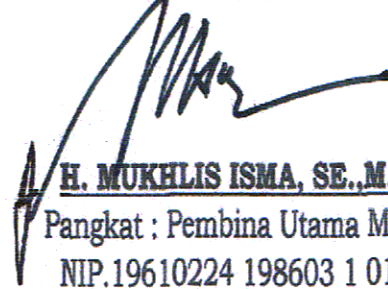
BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan dari tingkat Dinas Sosial Kabupaten Sinjai.

Rencana Strategis ini untuk dijadikan pedoman/acuan bersama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian misi Dinas Sosial yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

KEPALA DINAS



H. MUKHLIS ISMA, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19610224 198603 1 013